BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Jl. H.R Soebrantas No. 01 (Komplek Kantor Bupati Lama) Kecamatan Bangkinang Kota
E-mail: panwaslukabupatenkampar2017@gmail.com

Bangkinang, 04 September 2024

Nomor : 434/PM.00.02/K.RA-04/9/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Kampar

Di-
Bangkinang

A. Dasar Hukum :

a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);.
b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
d. PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
e. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
f. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Himbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024. Sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas dan demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan Pencalonan, Berdasarkan hasil Pegawasan penelitian persyaratan Administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, demi menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024. Maka Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Pegawasan penelitian persyaratan Administrasi dihimbau kepada KPU Kabupaten Kampar agar menyampaikan hasil penelitian administrasi dan menyampaikan hasil klarifikasi faktual terkait dokumen persyaratan bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau petugas Penghubung/LO atau pasangan calon secara komprehensif dan meminta kepada paslon meyampaikan perbaikan sesuai tahapan.
2. Dalam hal paslon telah memenuhi perbaikan sebagaimana angka 1, diminta kepada KPU Kabupaten Kampar agar menyampaikan salinan dokumen hasil perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kampar sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024.
3. Selanjutnya Agar KPU Kabupaten Kampar memastikan Sistem Informasi Pencalonan atau Silon berpungsi dengan baik terhadap akses pembacaan data di Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau petugas Penghubung/LO dalam proses perbaikan persyaratan calon.
4. Agar KPU Kabupaten Kampar melaksanakan tahapan pencalonan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

C. Penutup

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Syawir Abdullah

Tembusan disampaikan kepada yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 434/PM.00.02/K.RA-04/09/2024
Tanggal : 04 September 2024

1. Drs Yusri, M.Si

a. Ijazah SMA (berbeda tahun lahir dengan KTP) di ijazah 1969, di KTP 1972 (ada dilampirkan surat keterangan dari sekolah)

- unggah surat pernyataan dari sekolah mengenai perbedaan tersebut ke SILON
- unggah calon membuat surat pernyataan terkait perbedaan tahun lahir

b. admin paslon untuk mengubah Nama dan Title paslon
c. Pas Foto latar belakang Putih, digital tanpa latar belakang dengan format png ukuran 4x6
d. tambah program (hanya ada visi dan misi)
e. kurang materai di Laporan pencalonan PNS
f. Tanda terima pengunduran diri harus memuat informasi tanda terima pemberhentian belum diterbitkan
g. Unggah Tanda Terima (Memuat Informasi Sk Belum Diterbitkan) dan Keterangan Diri Sedang Diproses Dari BKPSDM (Diunggah Ke Silon)
h. unggah surat pajak ke Tanda terima penyampaian pajak

2. H. Rinto Pramono

a. Yang Di Upload Jadi Pas Photo 4x6 Dengan Latar Putih
b. Tambah program (hanya visi dan misi)
c. perbaiki data calon dan wakil dipisah dengan gelarnya
d. unggah surat pajak ke Tanda terima penyampaian pajak juga
e. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK Belum Benar penulisan gelar tidak sesuai (kurang spasi)
f. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Belum Benar dimana program Pasangan Calon tidak ada Menandatangani

3. Ahmad Yuzar

a. BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tidak di ttd Sekretaris Nasdem (AMRIZAL)
b. PENULISAN GELAR S1 NYA TIDAK SESUAI (TIDAK SESUAI DENGAN SILON DAN IJAZAH). S.Sos (S nya hilang)
c. PENULISAN GELAR S2 NYA TIDAK SESUAI (TIDAK SESUAI DENGAN SILON DAN IJAZAH) seharusnya M.T
d. BUKTI penyampaian SPT ELEKTRONIK (e-filling) diunggah ke SILON (tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak)
e. DRH diubah karena penulisan gelarnya kurang, diurutkan riwayat pendidikannya, urutkan tahunnya untuk riwayat pekerjaan
f. latar belakang pass photo warna putih (tanpa latar berlakang) dan ukuran 4x6
g. upload surat pernyataan yang menyatakan naskah visi, misi dan program dengan materai
h. UNGGAH TANDA TERIMA (memuat informasi SK belum diterbitkan) DAN KETERANGAN DIRI SEDANG DIPROSES DARI BKPSDM (diunggah ke SILON)
i. kurang materai di Laporan pencalonan PNS

4. Misharti

   a. BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tidak di ttd Sekretaris Nasdem (AMRIZAL)
   b. latar belakang pass photo warna putih (tanpa latar berlakang) dan ukuran 4x6
   c. upload surat pernyataan yang menyatakan naskah visi, misi dan program dengan materai
   d. Tanda terima harus memuat Keterangan bahwa SK pemberhentian belum di terbitkan

5. Yuyun Hidayat

   a. LEGALISIR untuk S2 (M.Sc)
   b. surat keterangan tidak pailit belum aslinya
   c. surat keterangan tidak ada hutang belum aslinya
   d. LHKPN Periode 2023
   e. surat keterangan tidak punya tunggakan pajak
   f. seharusnya yang diupload Pas foto calon: fisik dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6; dan digital tanpa latar belakang berformat .png
   g. ijazah S2 (M.Sc) Merupakan dokumen yang sah (harus legalisir) dari instansi berwenang
   h. SK Pemberhentian dari Anggota DPRD Provinsi
   i. tanda terima Pengunduran diri dari DPRD Provinsi

6. Edwin Pratama Putra

   a. Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang masih proses
   b. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak MASIH PROSES
   c. SURAT KETERANGAN pencantuman Gelar Haji
   d. Pas foto calon: fisik dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6; dan digital tanpa latar belakang berformat .png
   e. surat pengunduran diri tidak bermaterai
   f. tanda terima pengunduran diri tidak mencantumkan keterangan SK belum diterbitkan

7. Repol

   a. Dokumen Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya yang diupload ke Silon tidak sesuai dengan data diri Calon. Serta dokumen fisiknya tidak ada
   b. Dokumen Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak yang diunggah tidak sesuai. seharusnya dokumen Merupakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak calon menjadi wajib pajak
   c. Pas foto calon: berformat .png dan tanpa latar belakang (putih)

8. Rahmad Jevary Juniardo

   a. Nama di Ijazah berbeda dengan KTP. harus dilengkapi dengan surat keterangan dari sekolah yang memuat informasi perbedaan nama dan surat pernyataan calon yang berisi penjelasan terkait perbedaan nama antara dokumen ijazah dengan KTP. dibuat dan di ttd calon dengan matrai

b. Dokumen Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak yang diunggah tidak sesuai. seharusnya dokumen Merupakan tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) atau sejak calon menjadi wajib pajak
c. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak tidak sesuai. seharusnya Merupakan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak tempat Pasangan Calon yang bersangkutan terdaftar.
d. Surat keterangan dari sekolah tidak sesuai. seharusnya surat keterangan dari sekolah Menerangkan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah merupakan calon yang namanya tercantum pada KTP-el. Diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
e. Dokumen foto tidak sesuai. seharusnya Pas foto calon: fisik dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6; dan digital tanpa latar belakang berformat .png